

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Anak Jalanan

Jumlah anak jalanan di kota Yogyakarta setiap tahunnya semakin meningkat. Berikut ini adalah data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) menurut jenis kelamin Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Yogyakarta tahun 2012.

Tabel 1. Data Jumlah PMKS Menurut Jenis Kelamin Kota Yogyakarta
Tahun 2012

No.	Jenis PMKS	Jenis Kelamin				
		Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
1	Anak balita terlantar	7	44	9	56	1
2	Anak terlantar	311	59	218	41	529
3	Anak nakal	-	-	-	-	-
4	Anak jalanan	129	60	85	40	214
5	Korban tindak kekerasan	32	12	239	88	271
6	Lanjut usia terlantar	438	21	1.642	79	2.080
7	Penyandang cacat	1.377	56	1.088	44	2.465
8	Tuna susila	-	-	77	100	77
9	Pengemis	3	10	28	90	31
10	Gelandangan	7	70	3	30	10
11	NAPZA	231	95	12	5	243
12	Pekerja migran bermasalah sosial	22	61	14	39	36
13	Bekas warga binaan lembaga kemasyarakatan	576	95	31	5	607

(Sumber: Dinsosnakertrans kota Yogyakarta)

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah anak jalanan di kota Yogyakarta pada tahun 2012 cukup banyak yaitu sebesar 214. Jumlah tersebut terdiri atas laki-laki sebesar 129 orang (60%) dan perempuan sebesar 85 orang (40%).

2. Gambaran Umum Fungsi Pemerintah dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Yogyakarta

Permasalahan anak jalanan menjadi bagian tanggungjawab pemerintah dalam penanganannya. Hal ini tidak terlepas dari fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, penyandang dana dan pendamping. Sebagai regulator, pemerintah kota Yogyakarta memiliki fungsi dalam memberikan rambu-rambu berupa peraturan dalam menangani anak jalanan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 dan Perda No 6 Tahun 2011. Sementara fungsi fasilitator, pemerintah bertindak dalam memfasilitasi setiap kegiatan penanganan anak jalanan. Selain itu, sebagai fasilitator pemerintah kota Yogyakarta juga harus mampu bertindak ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat dalam penanganan anak jalanan.

Pemerintah juga memiliki fungsi penyandang dana yakni sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan penanganan

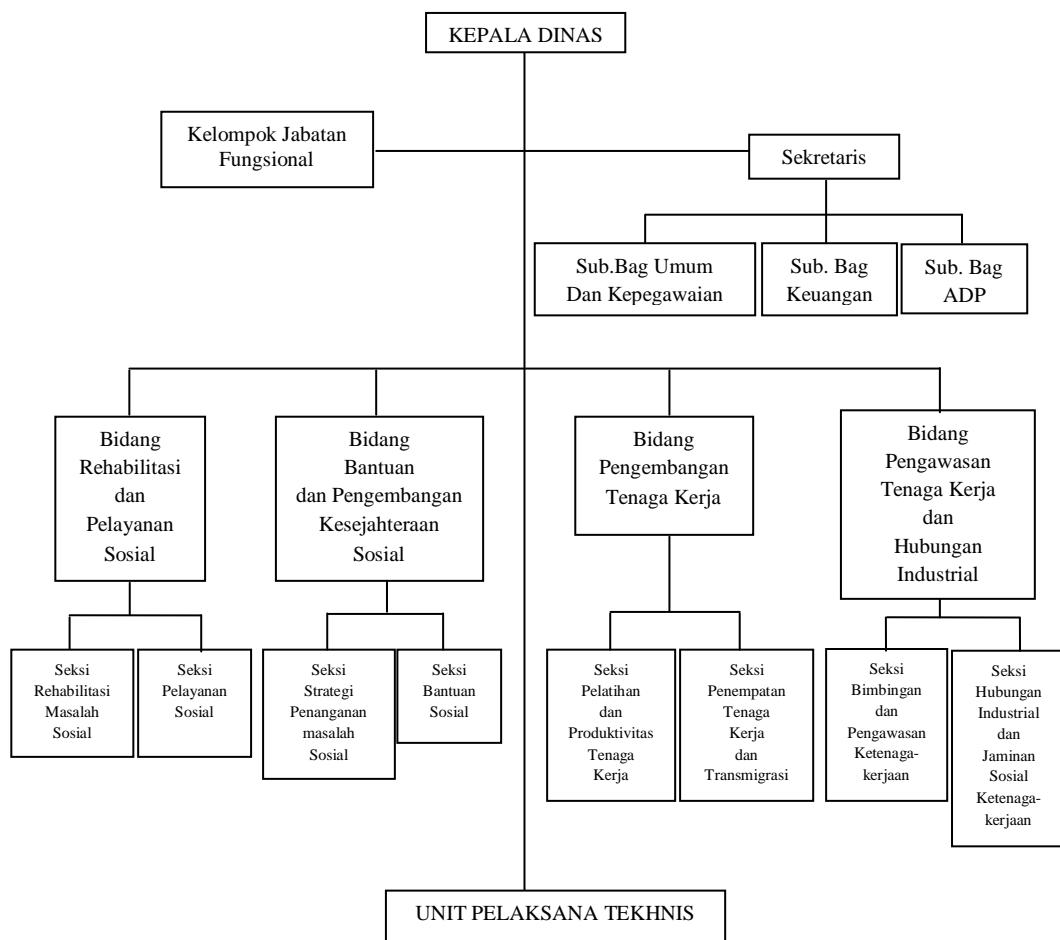
anak jalanan. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyediakan dana penanganan anak jalanan menggunakan dana APBD. Fungsi lain pemerintah adalah fungsi pendamping yakni pemerintah mendampingi dan melayani serta setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan penanganan masalah anak jalanan. Hal ini berarti pemerintah mendampingi kegiatan-kegiatan penanganan anak jalanan, tidak hanya secara struktural bekerja di dalam kantor tetapi juga mendampingi hingga turun di lapangan.

Pemerintah Kota Yogyakarta menangani permasalahan anak jalanan melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta (Dinsosnakertrans). Dinsosnakertrans dalam melaksanakan tugasnya juga memiliki visi dan misi. Visi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yaitu “Terwujudnya kesejahteraan sosial menuju kemandirian masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia seutuhnya, penanganan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri serta berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut perlu didukung dengan sarana kebijakan yang lebih konkret dan terarah, sehingga Visi tersebut bukan hanya merupakan slogan atau retorika belaka, namun lebih dari itu adalah merupakan sasaran akhir yang akan dijadikan tujuan. Oleh karena itu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta mencoba menyusun Sarana Kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a) Mewujudkan profesionalisme SDM internal dan optimalisasi ketatausahaan.

- b) Mewujudkan Pelayanan, Bantuan dan Rehabilitasi Sosial dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- c) Mewujudkan pelayanan di bidang pelatihan, penempatan tenaga kerja dan transmigrasi serta perluasan kesempatan kerja.
- d) Mewujudkan terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan (Sumber: Dokumentasi Dinsosnakertrans, 2014).

Berikut struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

3. Gambaran Umum Kemitraan Pemerintah

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan anjal di Kota Yogyakarta melakukan kemitraan dengan pihak luar. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan yang menjelaskan bahwa pemerintah berwenang untuk melakukan koordinasi dan mengembangkan kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta. Hal ini dilakukan agar penanganan masalah anak jalanan menjadi lebih optimal, sehingga mendorong terciptanya *good governance*.

Masalah anak jalanan merupakan masalah sosial yang tidak mudah ditangani. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala rehabilitasi masalah sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang berinisial NMY, yaitu:

“Anak jalanan di kota Yogyakarta itu sangat banyak ya mbak. Anak jalanan ada dua, yakni anak jalanan dalam kota dan luar kota Yogyakarta...Anak jalanan tersebar di seluruh wilayah di kota Yogyakarta seperti lampu-lampu merah, keramaian dan sampai-sampai terdapat kantong-kantong anjal dibeberapa titik yang sudah kami data dan identifikasi. Untuk penanganannya sendiri tidak mudah, karena untuk menangani masalah anak jalanan itu pasti erat kaitannya dengan kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Nah, bagaimana faktor kemiskinan tersebut kita mampu carikan solusinya, kemudian bagaimana merubah *mindset* anak jalanannya sendiri agar tidak turun ke jalan, dan juga pasti bagaimana agar masyarakat mendukung program-program yang kami terapkan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Lebih lanjut, kepala rehabilitasi masalah sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang berinisial NMY juga mengungkapkan mengenai

kemitraan yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan pihak luar sebagai berikut:

“...Pegawai di bagian rehabilitasi hanya 5, saya sebagai kepala seksi dan 4 staff lainnya. Oleh karena itu pasti kita butuh pihak-pihak lain untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program-program dalam rangka penanganan masalah sosial, salah satunya masalah anak jalanan. Maka dari itu, kita melakukan mitra dengan pihak lain. Adapun demikian kita tidak hanya regulasi saja, kita juga ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu kita juga sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan, contohnya masalah dana. Mungkin lebih tepatnya melakukan kemitraan ini agar penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta ini lebih optimal. Sekarang kan penanganan masalah sosial lebih dengan cara *bottom-up* atau dari bawah ke atas. Nah, dengan adanya kemitraan ini penanganan anak jalanan selain lebih optimal juga penanganan benar-benar melihat kejadian atau kenyataan sesungguhnya di lapangan. Jadi program atau kegiatan penanganan yang tepat seperti apa itu karna telah menyesuaikan dengan keadaan di lapangan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masalah anak jalanan bukanlah masalah yang mudah ditangani karena berkaitan dengan berbagai faktor diantaranya faktor kemiskinan. Selain itu cakupan wilayah yang harus ditangani sangat besar yakni satu kota. Padahal jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinsonakertrans sangat minim. Hal tersebut yang menjadikan Pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta kurang optimal dalam menangani anak jalanan. Agar penanganan masalah anak jalanan lebih optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan, maka pemerintah kota Yogyakarta melakukan kemitraan. Pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan kemitraan berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menangani masalah sosial diantaranya masalah anak jalanan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak. Berikut ini merupakan mitra Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menangani masalah sosial:

Tabel 2. Mitra Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam Menangani Masalah Sosial

No	Mitra	2010	2011	2012
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	1.360	1.400	1.158
2	Lembaga yang bergerak di bidang sosial	176	176	176
3	Personal TAGANA	235	235	93
4	Karang Taruna	45	45	45
5	Panti Pemerintah	3	3	3
6	Panti Swasta	15	15	14
7	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	12	12	12
8	Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM)	293	358	312
9	Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM)	50	57	56
10	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	14	14	14
Jumlah		2.209	2.315	1.838

(Sumber: Dokumentasi Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, 2013)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menangani masalah sosial khususnya masalah anak jalanan cukup banyak memiliki kemitraan, diantaranya dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM), Lembaga yang bergerak di bidang sosial, Personal TAGANA, Karang Taruna, Panti Pemerintah, Panti Swasta, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM), Usaha Sosial Ekonomi Produktif Keluarga Miskin (USEP-KM), Tenaga Kesejahteraan

Sosial Kecamatan (TKSK). Kemitraan Dinsosnakertrans yang banyak menangani masalah anak jalanan yaitu dengan dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Terkait dengan mitra Dinsosnakertrans dan alasan Dinsosnakertrans melakukan kemitraan dengan I-PSM, Ibu NMY menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“Kalau mitra kita itu banyak ya mbak, menurut data ada sekitar 176 lembaga yang bergerak dibidang sosial. Itu secara keseluruhan ya mbak, artinya mitra dari semua bidang di Dinsosnakertrans. Dan PSM sendiri ada sekitar 1500an di tahun 2013 ini yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat....I-PSM itu bisa dibilang ujung tombaknya pemerintah Kota Yogyakarta mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Kelebihan I-PSM sebagai mitra Pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta diungkapkan Ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD seperti berikut:

“PSM kan pekerja sosial masyarakat atau relawan sosial. PSM melaksanakan tugas berdasarkan panggilan hati dan kepedulian sosial yang dimiliki...Kita tidak mendapat gaji. Ini murni karena kepekaan kita terhadap masalah sosial, bagaimana kita mampu membantu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Pemerintah melihat adanya potensi atau nilai lebih pada I-PSM sebagai mitra karena jumlah I-PSM yang sangat banyak mampu menyebar ke seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Anggota I-PSM yang berangkat dari kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar juga menjadikan nilai lebih I-PSM. Maka dari itu, Dinsosnakertrans melakukan kemitraan dengan I-PSM agar penanganan lebih optimal. Bahkan I-PSM bagaikan ujung tombak penanganan masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.

a. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (I-PSM)

Ikatan pekerja sosial masyarakat (I-PSM) adalah wadah berhimpun PSM sebagai media koordinasi, konsultasi, pertukaran informasi dan pengalaman serta pengembangan kemampuan administrasi dan teknis di bidang kesejahteraan sosial diantaranya mengenai penanganan masalah anak jalanan. I-PSM merupakan mitra pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan masalah anak jalanan. Ikatan PSM dapat dibentuk baik ditingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun nasional. Ikatan PSM bersifat tidak hirarkis, otonom, terbuka, mandiri, dan kordinatif.

b. Maksud dan Tujuan PSM

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 pasal 2 disebutkan bahwa PSM diadakan dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk berperan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan meningkatkan kepedulian warga masyarakat dalam menangani masalah sosial. Sementara tujuan diadakannya PSM yakni a) terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkesehjahteraan sosial, b) terwujudnya warga masyarakat yang memiliki keberfungsi sosial yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, c) tertanganinya masalah sosial.

c. Kedudukan, Tugas dan Fungsi PSM

PSM berkedudukan di desa/kelurahan dan mempunyai wilayah kerja di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Pekerja sosial masyarakat mempunyai tugas:

- 1) Menginisiasi penanganan masalah sosial;
- 2) Mendorong, menggerakkan, dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Sebagai pendamping sosial bagi warga masyarakat penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 4) Sebagai mitra pemerintah/intstitusi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan memantau program penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 pasal 6 dijelaskan fungsi PSM di dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) Perencana dan inisiator program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial,
- 2) Pelaksana dan pengorganisasi program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Pengembang kemitraan dan peningkatan kerjasama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- 4) Pengendali program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi PSM, Ikatan PSM dapat menyelenggarakan rapat kerja nasional untuk menyusun dan mengevaluasi program, dan menyelenggarakan musyawarah nasional untuk memilih kepengurusan Ikatan PSM, menetapkan peraturan Ikatan PSM, menetapkan rekomendasi, menyusun dan mengevaluasi program kerja lima tahunan.

d. Persyaratan PSM

Untuk menjadi anggota PSM terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 pasal 7 bahwa persyaratan menjadi PSM adalah sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Republik Indonesia
- 2) Setia dan taat kepada pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945
- 3) Telah berumur 18 tahun keatas
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Atas kemauan dan inisiatif sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun
- 6) Memperlihatkan itikad baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
- 7) Terus menerus menunjukkan karya nyata dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat

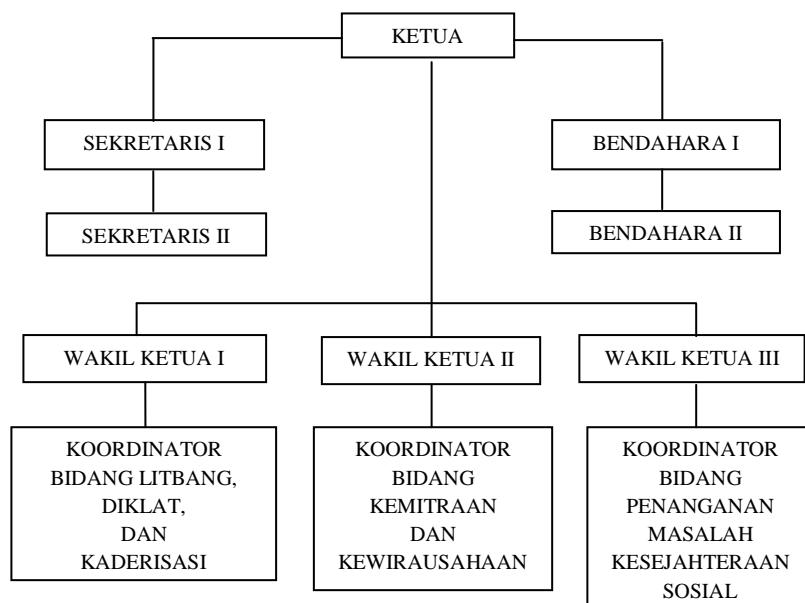
- 8) Telah mengikuti bimbingan atau pelatihan di bidang kesejahteraan sosial, dan
- 9) Memiliki sumber penghidupan yang memadai.

e. Pelatihan PSM

Pelatihan PSM terdiri atas pelatihan dasar dan pelatihan lanjutan.

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 pasal 18. Pelatihan PSM lanjutan disesuaikan dengan spesialisasi penanganan masalah sosial tertentu. Penyelenggara pelatihan terdiri dari: Kementerian Sosial, Pemerintah provinsi, Pemerintah kabupaten/kota; dan/atau Ikatan PSM pada setiap wilayah kerja. Penyelenggaraan pelatihan di luar pemerintah harus mengacu kepada standarisasi yang disusun oleh Kementerian Sosial.

Struktur Organisasi :



Gambar 5. Struktur Organisasi I-PSM Kota Yogyakarta

4. Deskripsi Kemitraan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam Menangani Masalah Anak Jalanan

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam menangani permasalahan anak jalanan di Kota Yogyakarta melakukan kemitraan dengan pihak luar. Berdasarkan hasil penelitian Chyntia Dewi A S menjelaskan bahwa implementasi Perda No. 6 Tahun 2011 sudah banyak memberikan efek positif dalam penanganan dan perlindungan anak jalanan, hal ini ditandai dengan adanya upaya-upaya dari pemerintah yang bekerja sama dengan Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FK PSM) atau sekarang berubah nama menjadi I-PSM dalam mewujudkan program-program pembinaan terhadap anak jalanan (anjal). Hal ini dilakukan agar penanganan masalah anak jalanan menjadi lebih optimal, sehingga mendorong terciptanya *good governance*.

Masalah anak jalanan merupakan masalah sosial yang tidak mudah ditangani. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala rehabilitasi masalah sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yang berinisial NMY yaitu:

“Anak jalanan di kota Yogyakarta itu sangat banyak ya mbak. Anak jalanan ada dua, yakni anak jalanan dalam kota dan luar kota Yogyakarta...Anak jalanan tersebar di seluruh wilayah di kota Yogyakarta seperti lampu-lampu merah, keramaian dan sampai-sampai terdapat kantong-kantong anjal dibeberapa titik yang sudah kami data dan identifikasi. Untuk penanganannya sendiri tidak mudah, karena untuk menangani masalah anak jalanan itu pasti erat kaitannya dengan kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Nah, bagaimana faktor kemiskinan tersebut kita mampu carikan solusinya, kemudian bagaimana merubah *mindset* anak jalannya sendiri agar tidak turun ke jalan, dan juga pasti bagaimana agar masyarakat mendukung

program-program yang kami terapkan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Lebih lanjut Ibu NMY sebagai kepala rehabilitasi masalah sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta juga mengungkapkan mengenai kemitraan yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan pihak luar sebagai berikut:

“...Pegawai di bagian rehabilitasi hanya 5, saya sebagai kepala seksi dan 4 staff lainnya. Oleh karena itu pasti kita butuh pihak-pihak lain untuk melaksanakan dan mengimplementasikan program-program dalam rangka penanganan masalah sosial, salah satunya masalah anak jalanan. Maka dari itu, kita melakukan mitra dengan pihak lain. Adapun demikian kita tidak hanya regulasi saja, kita juga ikut dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu kita juga sebagai fasilitator, memfasilitasi kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilaksanakan, contohnya masalah dana. Mungkin lebih tepatnya melakukan kemitraan ini agar penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta ini lebih optimal. Sekarang kan penanganan masalah sosial lebih dengan cara *bottom-up* atau dari bawah ke atas. Nah, dengan adanya kemitraan ini penanganan anak jalanan selain lebih optimal juga penanganan benar-benar melihat kejadian atau kenyataan sesungguhnya di lapangan. Jadi program atau kegiatan penanganan yang tepat seperti apa itu karna telah menyesuaikan dengan keadaan di lapangan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Terkait dengan mitra Dinsosnakertrans dan alasan Dinsosnakertrans melakukan kemitraan dengan I-PSM, Ibu NMY menjelaskan alasannya sebagai berikut:

“Kalau mitra kita itu banyak ya mbak, menurut data ada sekitar 176 lembaga yang bergerak dibidang sosial. Itu secara keseluruhan ya mbak, artinya mitra dari semua bidang di Dinsosnakertrans. Dan PSM sendiri ada sekitar 1500an di tahun 2013 ini yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat....I-PSM itu bisa dibilang ujung tombaknya pemerintah Kota Yogyakarta mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Kelebihan I-PSM sebagai mitra Pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta diungkapkan oleh Ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD seperti berikut:

“PSM kan pekerja sosial masyarakat atau relawan sosial. PSM melaksanakan tugas berdasarkan panggilan hati dan kepedulian sosial yang dimiliki...Kita tidak mendapat gaji. Ini murni karena kepekaan kita terhadap masalah sosial, bagaimana kita mampu membantu menyelesaikan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masalah anak jalanan bukanlah masalah yang mudah ditangani karena berkaitan dengan berbagai faktor diantaranya faktor kemiskinan. Selain itu cakupan wilayah yang harus ditangani sangat besar yakni satu kota. Padahal jumlah sumber daya manusia yang ada di Dinsonakertrans sangat minim. Hal tersebut yang menjadikan Pemerintah dalam hal ini Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta kurang optimal dalam menangani anak jalanan. Agar penanganan masalah anak jalanan lebih optimal dan sesuai dengan kondisi di lapangan, maka pemerintah kota Yogyakarta melakukan kemitraan. Pemerintah kota Yogyakarta dalam melakukan kemitraan berfungsi sebagai regulator dan fasilitator.

Pemerintah melihat adanya potensi atau nilai lebih pada I-PSM sebagai mitra karena jumlah I-PSM yang sangat banyak mampu menyebar ke seluruh penjuru Kota Yogyakarta. Anggota I-PSM yang berangkat dari kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan sekitar juga menjadikan nilai lebih I-PSM. Maka dari itu, Dinsosnakertrans melakukan kemitraan

dengan I-PSM agar penanganan lebih optimal. Bahkan I-PSM bagaikan ujung tombak penanganan masalah anak jalanan di Kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM akan dilihat dari indikator *input*, *proses*, *output* dan *outcome*. Berikut penjelasan masing-masing indikator kemitraan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam menangani masalah anak jalanan:

a. Kemitraan Dari Segi *Input*

Tolok ukur keberhasilan kemitraan dari segi input dapat diukur dari tiga hal yakni terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan, adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan, dan adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

- 1) Terbentuknya tim, wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan

Mengenai terbentuknya tim, wadah atau sekretariat yang ditandai adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan, kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY mengungkapkan bahwa:

“Kemitraan pemerintah dan I-PSM itu ada di Permensos No 1 Tahun 2012. Disitu dijelaskan bahwa Pekerja Sosial Masyarakat sebagai mitra pemerintah yang berangkat dari peran serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. I-PSM itu bisa dibilang ujung tombaknya pemerintah kota Yogyakarta mbak. I-PSM itu terorganisir, berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan hingga kota. Jumlah anggota PSM yang sangat banyak, tersebar hingga di setiap kelurahan ada, menjadikan penanganan masalah-

masalah sosial itu lebih optimal karena penanganan benar-benar sesuai kenyataan di lapangan. Selain itu, juga mereka lebih dekat dengan masyarakat. Anggota PSM sendiri bekerja berdasarkan hati dan kesukarelaan, mereka berangkat ikut menangani permasalahan sosial yang ada hanya karna jiwa sosial mereka yang tinggi. Mereka kerja seperti itu tidak dibayar mbak. Murni karna panggilan hati mereka” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Berdasarkan keterangan di atas menunjukkan bahwa terbentuk wadah kemitraan pada Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta yaitu I-PSM. I-PSM berasal dari masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi meskipun tidak menerima gaji. I-PSM merupakan wadah yang terorganisir, berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan hingga kota. Melalui kemitraan dalam bentuk I-PSM ini diharapkan penanganan masalah sosial khususnya masalah anak jalanan dapat lebih optimal.

Hasil wawancara di atas juga didukung oleh ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD dalam wawancaranya pada tanggal 24 Februari 2014 sebagai berikut:

“Kemitraan I-PSM sebetulnya sudah lama tapi sekarang dengan terbitnya Permensos No 1 Tahun 2012 itu ditegaskan bahwa I-PSM adalah sebagai mitra pemerintah dalam rangka penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang ada di wilayah. Sebelumnya sudah kerjasama. Akan tetapi kerjasamanya belum terlalu fokus dan jelas. Nah, semenjak Kemensos No 1 Tahun 2012 kerjasama menjadi lebih fokus dan jelas. PSM kan pekerja sosial masyarakat atau relawan sosial. Kegiatan sosial kan secara struktural di Dinsosnakertrans. Jadi kita memang mitra dari Dinsosnakertrans. I-PSM merupakan organisasi sosial, disini berkumpul orang-orang yang mempunyai inisiatif dan peka terhadap sosial, sehingga mereka menamakan diri sebagai Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa I-PSM merupakan bentuk wadah kemitraan dalam rangka penanganan PMKS

(Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) diantaranya penanganan masalah anak jalanan. Hal ini juga termuat dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2012.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam kemitraan yang dilakukan Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan masyarakat terbentuk wadah yaitu I-PSM yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2012.

- 2) Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan

Kemitraan yang dilakukan antara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam rangka penanganan masalah anak jalanan telah disediakan sumber dana/biaya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY bahwa:

“Dulu dana penanganan anak jalanan itu dari APBD melalui Bansos (Bantuan Sosial) sebesar 45.000.000. Jadi Bansos itu uang dari pemerintah langsung diturunkan ke misalnya ke I-PSM, kita hanya sebagai perantara saja mbak, karena uang langsung diturunkan ke I-PSM. Tapi sekarang pendanaan menggunakan belanja langsung. Setiap ada kegiatan mengajukan proposal dulu kemudian disetujui baru uang turun, begitu setiap ada kegiatan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa tersedia sumber dana/biaya dari pemerintah dalam pengembangan kemitraan dengan I-PSM. Dana yang disediakan untuk penanganan anak jalanan awalnya berasal dari APBD melalui bantuan sosial sebesar Rp 45.000.000.

Dana tersebut diperuntukkan bagi I-PSM, sementara Dinsosnakertrans hanya sebagai perantara dana. Namun seiring berjalannya waktu, sumber dana yang diperuntukkan dalam pengembangan kemitraan mengalami perubahan yakni menggunakan belanja langsung dari APBD. Hal ini menjadikan I-PSM dalam mengadakan kegiatan harus mengajukan proposal terlebih dahulu.

Tidak berbeda jauh, Bapak KSD, ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY juga mengungkapkan hal yang sama mengenai adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan dengan I-PSM. Menurut ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD, mengenai adanya sumber dana kemitraan adalah sebagai berikut:

“Dulu dari Bantuan Sosial (Bansos) 45 juta. Kalau sekarang Belanja Langsung. Jadi sekarang kita malah membuat matrik dulu sesuai dengan acuan kita, trus nanti untuk pengambilan dana dari belanja langsung. Jadi umpamanya gini, kita mengadakan rapat, rapat awal untuk membuat regulasi anak jalanan berbasis masyarakat. Anggarannya berapa, diajukan ke dinas, baru keluar dananya. Belanja langsung ini berarti dana tidak di I-PSM, kalau dulu bantuan sosial dana seluruhnya di I-PSM. Kalau belanja langsung setiap menggunakan anggaran kita pertanggungjawabkan” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam rangka penanganan masalah anak jalanan terdapat sumber dana/biaya sebesar Rp 45.000.000,- . Sumber dana pada awalnya berasal dari APBD melalui dana bantuan sosial. Namun sekarang

sumber dana dari belanja langsung APBD, sehingga I-PSM dalam setiap kegiatannya harus membuat proposal terlebih dahulu. Apabila proposal disetujui maka dana dapat cair untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Setiap dana kegiatan dibuat laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, Pemerintah dalam melakukan kemitraan dengan I-PSM telah menjalankan fungsinya sebagai penyandang dana.

- 3) Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait

Adanya dokumen perencanaan merupakan salah satu hal penting dalam kemitraan. Menurut kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY terdapat dokumen perencanaan yang telah disepakati antara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam penanganan masalah anak jalanan. Berikut ini merupakan kutipan hasil wawancaranya:

“Terdapat dokumen kesepakatan itu setiap ada kegiatan pasti ada SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Jadi dokumen kesepakatan ada ya setiap mau melakukan kegiatan. Jadi mulai dari pembentukan tim, menyusun rencana kerja dan sebagainya ada SK nya. Rencana kerja atau rencana kegiatan itu diajukan oleh I-PSM kepada Dinsosnakertransnakertrans kota Yogyakarta. Nanti kita rapatkan, kita sesuaikan, karena kan kita juga mempunyai regulasi atau kebijakan-kebijakan terkait masalah anak jalanan, maka dari itu kita sesuaikan agar selaras dan tidak terjadi pertentangan dengan kebijakan yang ada. Setelah disesuaikan dan disetujui barulah kegiatan itu mulai dilaksanakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan itu sistemnya bottom-up, jadi ada permasalahan di lapangan barulah dibuat kegiatan-kegiatan untuk menangani masalah itu. Jadi I-PSM yang membuat rencana dan dibahas bersama dengan Dinsosnakertrans agar terdapat kesepakatan dengan memperhitungkan berbagai macam hal, dari sudut pandang

kebijakan, dana, dll” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam kemitraan dalam rangka penanganan masalah anak jalanan antara Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM telah terdapat dokumen perencanaan yang telah disepakati bersama dalam bentuk SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Prosedur untuk mencapai kesepakatan yakni I-PSM menyusun rencana kegiatan sesuai dengan kondisi anak jalanan di lapangan. Kemudian rencana kegiatan tersebut diajukan oleh I-PSM kepada Dinsosnakertrans kota Yogyakarta. Oleh Dinsosnakertrans, rencana kegiatan tersebut dibahas dengan memperhitungkan berbagai macam hal, dari sudut pandang kebijakan dan dana. Apabila rencana kegiatan disepakati maka dibuatlah dokumen perencanaan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD juga mengungkapkan hal yang sama bahwa setiap kegiatan yang berkaitan penanganan masalah anak jalanan terdapat dokumen kesepakatan atau dasar hukum yang melandasi kemitraan antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM yakni berupa SK Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta. Adapun terbentuknya I-PSM berdasarkan SK Walikota

untuk lingkup kota dan SK Gubernur untuk lingkup provinsi. Mengenai mekanisme perencanaan dalam penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta, ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD menjelaskan sebagai berikut:

“Jadi mekanismenya, kita punya matrik kegiatan trus kita paparkan di Dinsosnakertrans. Dinsosnakertrans juga punya regulasi. Nah kita sesuaikan, jangan sampai kita itu yang namanya mitra malah melawan/tidak sejalan sama Undang-undang. Jangan sampai. Itu kan kebijakan. Kita punya program itu trus kita *match*-kan atau dicocokkan dengan Dinsosnakertrans. Kita samakan persepsilah, sehingga menjadi sebuah program. Kasarannya, kita bikin proposal, diajukan ke Dinsosnakertrans, di Dinsosnakertrans nanti direspon, dicermati, mana-mana yang pas dan mana-mana yang tidak pas trus nanti kita akumulasikan, kemudian muncullah sebuah program. Setiap kegiatan kita difasilitasi oleh pemerintah kota melalui Dinsosnakertrans. Jadi ini sesuai dengan proposal. Jadi dalam proposal itu kan ada matrik kegiatan, trus ada dana, setelah itu kita sesuaikan” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mekanisme perencanaan dalam penanganan anak jalanan di kota Yogyakarta dimulai dari pembuatan proposal kegiatan oleh I-PSM yang kemudian diajukan kepada Dinsosnakertrans. Oleh Dinsosnakertrans, proposal kegiatan tersebut dibahas dan disesuaikan dengan regulasi, dana dan manfaatnya. Apabila proposal kegiatan telah disepakati maka muncullah sebuah program dan disepakati dokumen perencanaan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan kajian dokumentasi yang dilakukan peneliti juga membuktikan bahwa kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam penanganan anak jalanan

dilengkapi dengan dokumen perencanaan dalam bentuk SK (Surat Keputusan) dari Walikota atau SK dari Gubernur.

Dengan demikian, kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM terdapat dokumen pembentukan tim penanganan masalah anak jalanan yang telah disepakati dalam bentuk SK (Surat Keputusan) dari Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi input dapat dikatakan telah berhasil. Hal ini terbukti dengan adanya terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan, adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan, dan adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam bentuk SK.

b. Kemitraan Dari Segi Proses

Tolok ukur keberhasilan kemitraan dari segi proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan. Menurut Kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY mengemukakan mengenai agenda pertemuan dalam membahas penanganan anak jalanan sebagai berikut:

“Kalau agenda pertemuan antara kami dengan I-PSM itu kondisional ya mbak, jadi tergantung situasi dan kondisi. Jika akan mengadakan kegiatan atau membahas perkembangan penanganan masalah anak jalanan baru diadakan pertemuan. Tidak pasti seminggu sekali atau dua minggu sekali. Bisa saja

ketika akan diadakan kegiatan bisa seminggu dua kali. Tapi di I-PSM terdapat jadwal rutin karena I-PSM telah terbagi tim-tim yang mempunyai kegiatan rutin, jadi antar PSM ada rapat terkait penanganan masalah anak jalanan di daerah yang mereka dampingi” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa agenda pertemuan yang dilakukan Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam mengadakan kegiatan ataupun membahas penanganan masalah anak jalanan dilakukan secara kondisional. Hal ini berarti agenda pertemuan dilakukan menyesuaikan kebutuhan dan berdasarkan jadwal rutin dalam tim I-PSM.

Keterangan tersebut juga sama dengan yang dikemukakan oleh ketua I-PSM Kota Yogyakarta dan Provinsi DIY yang berinisial KSD mengenai agenda pertemuan untuk mengadakan kegiatan dan membahas penanganan masalah anak jalanan dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Namun agenda rutin yang dilakukan khusus tim I-PSM sebulan sebanyak 4 kali pertemuan. Selain itu, apabila ada info terbaru mengenai kondisi lapangan terbaru khususnya anak jalanan langsung dilakukan pertemuan antar tim di I-PSM. Dari dokumentasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan ada beberapa dokumentasi pertemuan seperti agenda pertemuan, daftar hadir peserta pertemuan dan notulen pertemuan.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, I-PSM pada tahun 2010 dalam melaksanakan aktivitas penanganan anak jalanan ini dibentuk kelompok kerja yang masing-masing mempunyai tugas

pokok dan fungsi saling terkait. Kelompok kerja (pokja) tersebut meliputi pokja sekretariat, pokja sapaan, pokja penjangkauan, pokja pembinaan, dan pokja pendampingan. Adapun penjabaran kinerja tersebut, antara lain:

- 1) Kelompok kerja (Pokja) Sekretariat,
 - a) Mendesign dan menggandakan formulir pendataan anak jalanan;
 - b) Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat;
 - c) Mencatat dinamika rapat dan notulennya;
 - d) Membuat Surat Kerja kepada Petugas Lapangan;
 - e) Menerima laporan dari setiap Kelompok Kerja;
 - f) Melakukan rekapitulasi seluruh laporan dari Kelompok Kerja
 - g) Membuat Laporan Akhir dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan
- 2) Kelompok kerja (Pokja) Sapaan,
 - a) Melakukan observasi lapangan;
 - b) Melakukan pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis;
 - c) Membuat rekapan perbincangan;
 - d) Menghadiri rapat koordinasi
 - e) Membuat laporan kegiatan lapangan
- 3) Kelompok kerja (Pokja) Penjangkauan,
 - a) Melakukan *home visit* bagi anak jalanan lokal;

- b) Melakukan pendekatan kepada tokoh kunci/kepala suku/ketua komunitas;
 - c) Melakukan identifikasi anak jalanan lokal maupun luar daerah serta lokasi kegiatannya;
 - d) Membuat janji-janji pertemuan untuk pendalaman materi;
 - e) Melakukan pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis;
 - f) Menghadiri rapat koordinasi;
 - g) Membuat laporan kegiatan lapangan
- 4) Kelompok kerja (Pokja) Pembinaan,
- a) Menerima data base hasil identifikasi untuk dilakukan rujukan;
 - b) Melakukan pemilihan anak jalanan lokal maupun luar daerah;
 - c) Melakukan rujukan kepada lembaga atau dinas terkait dalam pembinaan lanjutan;
 - d) Menghadiri rapat koordinasi;
 - e) Membuat laporan kegiatan lapangan.
- 5) Kelompok kerja (Pokja) Pendampingan,
- a) Melaporkan rencana kegiatan home visit dan pendampingan kepada Tokoh Masyarakat;
 - b) Melakukan motivasi secara intensif baik kepada anak jalanan maupun orang tuanya;
 - c) Membuat kelompok kegiatan usaha di wilayah pendampingan baik anjal atau ortunya;
 - d) Membuka akses lapangan kerja sesuai kriteria peluang kerja;

- e) Mencari Bapak Angkat bagi yang hendak berwirausaha;
- f) Menghadiri rapat koordinasi;
- g) Membuat laporan kegiatan lapangan

(Sumber: Dokumentasi I-PSM, 2014).

Penanganan anak jalanan yang terbagi atas kelompok kerja (Pokja) seperti diatas kemudian pada tahun 2013 dilakukan perubahan. Pembagian kerja seperti itu dinilai kurang optimal karena terlalu banyak *misscommunication* antar Pokja, Hal ini disampaikan oleh Ibu NMY sebagai berikut:

“...Sekarang dirubah karena kalau sapaan, pendampingan, pembinaan dan penjangkauan dipisah-pisah kemungkinan terjadi misscommunication-nya besar dan kurang efektif” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Kemudian pada tahun 2013, pelaksanaan aktivitas penanganan anak jalanan ini dibagi menjadi 3 tim yaitu tim utara, tim tengah dan tim selatan. Pembagian berdasarkan wilayah kerja. Tim utara memantau kantong-kantong anjal di perempatan Pingit, pertigaan Atakrib, perempatan Jlagran, Kopi Joos (Utara Stasiun Tugu), Sosrowijayan Kulon Gg.3 Sarkem, Jembatan Kleringan, Stasiun Lempuyangan, Perempatan Galeria, Perempatan Korem, Pertigaan Terban, dan Perempatan Mirota Kampus. Tim tengah memantau kantong-kantong anjal di Alun-Alun Utara, Parkiran Bus Wisata Ngabean, Perempatan Pasar Sentul dan Timur POM, serta Benteng

Vredeburg. Sementara tim selatan memantau kantong-kantong anjal di daerah Perempatan Giwangan dan Perempatan Tungkak.

Setiap tim I-PSM Kota Yogyakarta memiliki tugas yang sama yakni sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kegiatan.
- 2) Mendesain dan mengandalkan blangko pendataan anak jalanan.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan ditingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
- 4) Melaksanakan dan mengarsipkan administrasi program kegiatan.
- 5) Melaksanakan evaluasi dan monitoring program kegiatan secara berkala (1 bulan sekali).
- 6) Melakukan observasi lapangan/ titik-titik keberadaan anak jalanan.
- 7) Melakukan pendekatan, perkenalan, dan penjajagan dialogis.
- 8) Membuat catatan tentang kondisi anjal pada masing-masing waktu sapaan.
- 9) Membuat laporan kegiatan lapangan dengan basis titik-titik keberadaan anak jalanan.
- 10) Melakukan motivasi dan home visit bagi anak jalanan/ orang tua.
- 11) Melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh kunci.
- 12) Melakukan identifikasi anjal (dipisah antara anak jalanan kota dan luar kota).

- 13) Membuat kesepakatan pertemuan untuk pendalaman materi (kondisi anak jalanan).
- 14) Membangun jejaring dengan stake holder (lembaga / instansi yang mempunyai program pembinaan anak jalanan).
- 15) Melakukan rujukan kepada lembaga/instansi terkait dalam pembinaan lanjut.
- 16) Membuat laporan kegiatan lapangan.
- 17) Melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dan melaporkan program kegiatan.
- 18) Melakukan pendamping secara intensif kepada anak jalanan atau orang tua.
- 19) Membuka akses lapangan kerja, mencarikan bapak angkat dan membuat kelompok usaha di wilayah pendampingan baik untuk anak jalanan/ orang tua.
- 20) Melaksanakan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan program kegiataan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi proses dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. Selain itu, Dinsosnakertrans dan I-PSM terus menyempurnakan bentuk tim dalam menangani anak

jalanan dengan merubah pola penanganan apabila dinilai kurang optimal. Meskipun Dinsosnakertrans dan I-PSM sering melakukan rapat atau pertemuan untuk membahas mengenai penanganan anak jalanan tetapi masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh jadwal waktu pertemuan yang kurang rutin dijalankan tergantung dari kondisi tertentu, dan pertemuan yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup cepat atau kurang lama sehingga hasilnya kurang maksimal.

c. Kemitraan Dari Segi *Output*

Dalam kemitraan menangani masalah anak jalanan, pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, pendamping dan penyandang dana, sedangkan I-PSM sebagai implementator. Tolok ukur keberhasilan kemitraan dari segi *output* dapat diukur dari indikator jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi.

Menurut kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY mengemukakan kegiatan yang dilakukan dalam menangani anak jalanan bervariatif dan terdapat 3 sasaran utama yakni pada anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY, mengenai kegiatan dalam penanganan anak jalanan:

“Untuk anak jalanan kita adakan pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis supaya mereka akrab dengan kita. Atau dengan kata lain melakukan sapaan dan penjangkauan. Pendekatan itu menjadikan kita tau permasalahan-permasalahan mereka dan kami mencoba mencari jalan keluar permasalahannya itu. Akan tetapi sesekali kita mengadakan “*shock therapy*”, itu bahasa lainnya adalah “garukan” di tempat-tempat keramaian, lampu merah dan dipinggir-pinggir jalan ataupun di kantong-kantong anak jalanan itu. Kita bawa ke tempat pembinaan selama 3 hari. Kita data anak jalanan tersebut, kita pisah anjal dari dalam kota dan luar kota. Yang didalam kota nanti menjadi perhatian kami setelahnya, sedangkan luar kota kami kembalikan ke dinas sosial kota masing-masing untuk dapat diperhatikan oleh Dinsosnakertrans sana. Adapun demikian mereka tetap dibina selama 3 hari, kita beri pengarahan, pembekalan, ketrampilan, pengetahuan, sehingga akan sedikit merubah pola pikir mereka, dan harapannya mereka tidak turun lagi kejalan” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dalam menangani masalah anak jalanan melalui pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis serta *shock therapy* (“garukan”). Pendekatan dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan anak jalanan dan kemudian dicari solusi yang tepat. Bagi anak yang terkena “garukan” dilakukan pembinaan selama 3 hari dengan diberi pengarahan, pembekalan, keterampilan dan pengetahuan, sehingga diharapkan pola pikir anak jalanan berubah dan tidak turun lagi ke jalan.

Kemudian Bapak KSD menjelaskan pendekatan yang dilakukan PSM terhadap anak jalanan, seperti berikut:

“Pendekatan itu kita lakukan dengan menyapa anak jalanan di kantong-kantong anak jalanan yang sudah kita identifikasi. Kita kenalkan diri ke mereka. Kita mengenalkan diri juga tidak mudah. Kita punya cara-cara. Seumpama anak-anak senang es, kita belikan

es, pengen jajan kita belikan. Dengan begitu kita bisa kenal dengan mereka dan kita bisa tau permasalahan yang mereka hadapi sehingga menjadikan mereka turun ke jalan. Nah, ini input bagi kita untuk dibicarakan ke forum dan ditindaklanjuti...” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Dari penjelasan diatas penanganan anak jalanan di Kota Yogyakarta dimulai dari tahap pendekatan. Hal ini dikarenakan dari pendekatan tersebut didapat informasi yang kemudian dibawa ke forum dan dibahas oleh I-PSM bersama dengan Dinsosnakertrans. Informasi tersebut dijadikan sebagai input atau bahan perencanaan pelaksanaan penanganan anak jalanan.

Lebih lanjut kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY menjelaskan mengenai tindak lanjut dalam penanganan anak jalanan sebagai berikut:

“Anak jalanan kita tanya mereka ingin kembali kerumah dan sekolah, atau mau ikut pelatihan/ kursus. Apabila ingin sekolah, kami bekerjasama dengan pihak-pihak terkait seperti dinas pendidikan untuk mengurus bagaimana agar anak bisa masuk ke sekolah. Tetapi apabila yang lebih berminat di pelatihan, kami menyediakan pelatihan tambal ban dan stell roda, dan juga pelatihan salon/pangkas rambut. Kalau yang berminat di pelatihan, setelah pelatihan kita beri modal sesuai dengan bidangnya misal yang tambal ban kita fasilitasi peralatan tambal ban. Nah, dengan adanya kemandirian seperti itu kami mengharapkan anak tersebut tidak turun lagi ke jalan dan mencari penghasilan dari pekerjaan tersebut.

Keterangan di atas menjelaskan bahwa anak jalanan yang tertangkap diberi pilihan yakni kembali sekolah atau mengikuti pelatihan. Anak jalanan yang memilih untuk melanjutkan sekolah oleh pihak Dinsosnakertrans kota Yogyakarta bekerjasama dengan Diknas mengurus kelanjutan sekolah. Sementara anak jalanan yang memilih

pelatihan oleh pihak Dinsosnakertrans kota Yogyakarta bekerjasama dengan pihak-pihak luar memberikan pelatihan seperti tambil ban dan stell roda serta pelatihan salon.

Hasil wawancara tersebut juga sama dengan keterangan dari salah satu anak jalanan yang berinisial NAY yang mengungkapkan bahwa:

“Kegiatan saya di jalan ya ngamen ya kadang-kadang jual koran. kalau ngamen muter-muter, kalau jualan koran di perempatan Gramedia. Saya sering kena ‘garukan’. Biasanya kalau ketangkap dibina 3 hari. Ditanya-tanya rumahnya mana, kenapa ngamen, trus ditanyain mau pulang trus sekolah apa kerja gitu. Trus pulangnya dikasih uang saku. Kalau yang kemarin ini milih sekolah, makanya sekarang sekolah lagi. Kalau yang sebelum ini saya milih ikut pelatihan salon /mangkas rambut. Baru ikut 3 kali nggak saya terusin. Nggak suka mbak” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa anak jalanan memang saat tertangkap “garukan” dibina selama 3 hari serta diberi pilihan untuk melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan dari ibu NAY yang juga menuturkan bahwa NAY sering ketangkap dan diberikan pelatihan salon tetapi tidak suka kemudian melanjutkan sekolah.

Sasaran kegiatan dalam menangani masalah anak jalanan tidak hanya ditujukan pada anak jalanan saja tetapi juga pihak keluarga anak jalanan serta masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala rehabilitasi masalah sosial yang berinisial NMY sebagai berikut:

“Untuk keluarga kita adakan *home visit* atau kunjungan keluarga. Ini gunanya untuk menanyakan alasan kenapa anak turun ke jalan, mencari tahu kondisi keluarga, mencari tahu keadaan lingkungan

sekitar keluarga anak jalanan dan lain sebagainya. Ini dari pihak I-PSM berkali-kali datang ke rumah. Kalau Untuk menyentuh masyarakat kita menggunakan media leaflet dan papan himbauan mbak. Papan himbauan dimulai tahun 2009 sampai dengan sekarang. Tahun 2012 diganti gambarnya tapi slogannya tetep sama. Kemudian tahun 2013 diadakan lomba design papan himbauan tersebut” (Hasil wawancara pada tanggal 18 Februari 2014).

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa kegiatan dalam menangani anak jalanan tidak hanya ditujukan pada anak jalanan saja tetapi juga pihak keluarga anak jalanan dan masyarakat. Bagi keluarga anak jalanan, I-PSM melakukan *home visit* (kunjungan rumah) untuk mengetahui alasan anak turun ke jalan serta mengetahui kondisi keluarga dan lingkungan sekitar anak jalanan. Sementara untuk masyarakat dilakukan himbauan menggunakan media leaflet dan papan himbauan.

Tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh ketua I-PSM Kota dan Provinsi Yogyakarta yang berinisial KSD juga menjelaskan mengenai kegiatan untuk pihak keluarga anak jalanan dan masyarakat yaitu sebagai berikut:

“ ... Jadi orang tuanya kita bina juga. Kadang kita masukkan ke program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif). Kadang kita carikan juga pendampingan orang-orang tidak mampu. Ini lho kita punya data supaya dibina, supaya bisa menghidupi keluarganya, supaya anak tidak turun ke jalan, supaya anak yang masa pendidikan ya kembali ke pendidikan dan yang ingin usaha ya usaha. Jadi orang tua mencegah anaknya agar tidak kembali ke jalan. Jadi kita itu fokusnya anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat. Kalau masyarakat kita mempunyai leaflet dan papan himbauan. Leaflet itu kita sebarkan ke kelurahan-kelurahan dan setiap ada kegiatan di lapangan atau turun ke jalan kita bagikan. Supaya

orang-orang itu tau kita punya program seperti itu. Selain itu, kita punya papan himbauan yang dengan tegas melarang memberi uang pada anak jalanan, berilah pada lembaga-lembaga yang menangani hal ini. Tapi sekarang sudah lebih tegas karena disitu ada kata STOP! Gitu. Kalau dulu tulisannya HIMBAUAN. Ini juga nanti akan diterapkan pada gelandangan dan pengemis” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Februari 2014).

Jika dilihat dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa I-PSM melakukan kegiatan pembinaan pada keluarga anak jalanan melalui program penanggulangan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif). Sementara bagi masyarakat, program berupa papan himbauan dan larangan untuk memberi uang pada anak jalanan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa kemitraan Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dalam kegiatan menangani masalah anak jalanan terfokus tidak hanya pada anak jalanan saja tetapi juga pada pihak keluarga anak jalanan dan masyarakat. Kegiatan anak jalanan melalui pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis serta *shock therapy* (“garukan”). Bagi anak yang terkena “garukan” dilakukan pembinaan selama 3 hari dengan diberi pengarahan, pembekalan, keterampilan dan pengetahuan. Berikut dokumentasi kegiatan pembinaan anak jalanan.



Gambar 6. Kegiatan Pembinaan Anak Jalanan

Dari Gambar 5 di atas menjelaskan bahwa anak jalanan diberikan pembinaan berupa pelatihan seperti pelatihan tambal ban dan stell roda serta pelatihan salon (potong rambut). Selain itu, kegiatan pendekatan secara dialogis juga dilakukan sebagaimana dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 7. Kegiatan Pendekatan Dialogis Dengan Anak Jalanan

Pendekatan dialogis dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak jalanan sekaligus untuk memberikan pengarahan agar dapat merubah pola pikir anak jalanan untuk tidak kembali ke jalan.

Untuk meningkatkan kemandirian, pemerintah dan I-PSM juga memberikan bantuan kepada anak jalanan dan keluarganya seperti pada gambar berikut ini:



Gambar 8. Penyerahan Bantuan Kepada Anak Jalanan

Bantuan diberikan kepada anak jalanan agar dapat meningkatkan kemandirian dengan menciptakan lapangan kerja sendiri, sehingga anak jalanan tidak kembali ke jalanan. Bantuan berupa perlengkapan bengkel dan salon merupakan tindak lanjut dari pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah dan I-PSM. Sementara kegiatan bagi masyarakat masih sebatas himbauan dengan papan himbauan maupun leaflet.



Gambar 9. Bentuk Papan Himbauan dan Leaflet

Dengan demikian, kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi *output* dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hal ini terbukti jumlah kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang mencakup tiga sasaran yakni anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat. Kegiatan anak jalanan melalui pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis serta *shock therapy* (“garukan”). Bagi anak yang terkena “garukan” dilakukan pembinaan selama 3 hari dengan diberi pengarahan, pembekalan, keterampilan dan pengetahuan. Kegiatan pembinaan pada keluarga anak jalanan melalui program penanggulangan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) serta pengarahan. Sementara bagi masyarakat, program berupa papan himbauan dan larangan untuk memberi uang pada anak jalanan.

Namun dilain sisi kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM belum terlalu berhasil. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya anak jalanan yang ada di pinggir jalan. Meskipun Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM telah melakukan pendekatan dengan anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat, namun tidak semuanya mau ikut menerima pendekatan yang telah dilakukan oleh Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM serta kurangnya kesadaran dari anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat

sehingga hasil yang diinginkanpun kurang sesuai dengan yang diharapkan.

d. Kemitraan Dari Segi *Outcome*

Tolok ukur keberhasilan kemitraan dari segi *outcome* adalah menurunnya angka permasalahan anak jalanan. Permasalahan anak jalanan merupakan masalah yang tidak mudah untuk diselesaikan. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang melatarbelakangi anak untuk turun di jalanan. Menurut ketua I-PSM Kota dan Provinsi Yogyakarta pada hasil wawancara tanggal 24 Februari 2014, perbandingan jumlah anak jalanan dalam kota dan luar kota yakni 11% dari dalam kota dan 89% dari luar kota. Penanganan anak jalanan dari dalam kota dengan diberikan pembinaan sedangkan anak jalanan dari luar kota dikembalikan ke dinas kota di mana anak jalanan tersebut berasal.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kegiatan penanganan masalah anak jalanan ditujukan pada anak jalan, keluarga anak jalanan dan masyarakat. Namun kegiatan yang telah dilakukan Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dan I-PSM masih belum efektif. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anak jalanan yang berinisial NYD yang pernah mengikuti pelatihan dan pembinaan dari Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dan I-PSM mengungkapkan bahwa meskipun telah mendapatkan pelatihan dan melanjutkan pendidikan akan tetap berada di jalan untuk mengamen tetapi pada waktu pulang

sekolah dan libur sekolah. Hal ini dilakukan untuk membantu ekonomi keluarga termasuk untuk uang jajan sendiri.

Tidak berbeda jauh, keluarga NYD yang juga bekerja sebagai penjual koran (Ibu) juga menuturkan sebagai berikut:

“Kalau saya begini mbak, saya memang mendidik anak untuk bekerja. Saya orang miskin, orang nggak punya, trus anak saya harus lebih baik dari saya. Sebelum umur 18 tahun nanti anak-anak saya harus bisa mandiri. Saya tidak memperkerjakan anak. Ya ngamen dan jualan Koran itu untuk dia sendiri, ya istilahnya untuk uang saku dia sekolah. Saya juga dapat KMS. Pak Murti (anggota I-PSM) juga dulu pernah tanya, dapet KMS kan? Kenapa anak masih di jalan gitu mbak. Ya saya jawab, sejauh mana KMS bisa membiayai anak-anak? Tahun kemarin kan dapet Rp 4.000.000. Kalau anak sekolah di negeri bisa gratis tanpa bayar apa-apa, biasanya hanya bayar seragam. Tapi kalau di swasta kan bayar setengah. Ya masih berat ya walaupun dapet KMS”

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa keluarga anak jalanan yang berinisial NYD justru membiarkan anaknya untuk tetap mengamen di jalanan. Hal ini tidak terlepas karena adanya faktor ekonomi. Bagi ibu NYD dengan membantu mengamen atau berjualan koran dapat digunakan untuk uang saku sekolah.

Hasil wawancara dengan ketua RT dimana keluarga NYD tinggal juga mengungkapkan bahwa sosialisasi pemerintah atau dinas sosial dalam menangani masalah anak jalanan tidak pernah melibatkan pengurus. Dinas sosial dan I-PSM langsung mendatangi anak jalanan atau keluarga anak jalanan. Hal ini menjadikan ketua RT tidak mempunyai wewenang dalam mengimbau warganya agar tidak

bekerja sebagai pengamen dan takut dianggap mencampuri urusan pribadi warganya.

Media leaflet dan papan himbauan yang telah dilakukan pemerintah kota Yogyakarta dan I-PSM juga belum efektif. Hal ini terbukti berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti ternyata masih banyak masyarakat yang memberi uang pada anak jalanan. Menurut masyarakat yang berinisial HM memberi uang anak jalanan karena merasa kasihan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan sebagai berikut:

“ Iya mba lihat papan himbauan dilarang memberi uang kepada anak jalanan yang dipinggir-pinggir jalan itu kan? Tapi tetap kasihan aja mbak, masih kecil gitu udah nyari uang sendiri. Makanya tadi tak kasih” (Hasil wawancara tanggal 26 Februari 2014).

Hal yang sama juga dilakukan oleh masyarakat yang berinisial HR dan DY yang juga tetap memberikan uang pada anak jalanan. Hal ini dilakukan karena kedua masyarakat tersebut merasa tidak enak ketika anak jalanan menyodorkan kantong plastik sebagai tempat untuk menaruh uang pemberian.

Demikian pula dengan masyarakat yang berinisial CA dan CI yang justru memberikan uang pada anak jalanan karena faktor trauma. CA dan CI mengungkapkan bahwa keduanya memiliki pengalaman yang buruk dengan anak jalanan yakni pernah di ancam ketika tidak memberikan uang, sehingga keduanya memutuskan untuk tetap memberikan uang pada anak jalanan.

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut menunjukkan bahwa sasaran kegiatan penanganan masalah anak jalanan yang ditujukan untuk masyarakat melalui media leaflet dan papan himbauan belum berhasil menyentuh masyarakat. Terbukti masih adanya masyarakat yang merasa bukan tanggungjawabnya dan banyaknya masyarakat yang tetap memberikan uang kepada anak jalanan.

Berdasarkan laporan hasil pemutakhiran data PMKS Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga menunjukkan bahwa jumlah anak jalanan meningkat dalam 3 tahun terakhir. Berikut ini data jumlah anak jalanan kota Yogyakarta:

Tabel 3. Jumlah Anak Jalanan Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Anak Jalanan
2011	214 jiwa
2012	312 jiwa
2013	497 jiwa

(Sumber: Data PMKS Dinsos Kota YK, 2013)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan secara berturut-turut dalam 3 tiga tahun terakhir. Tahun 2012 jumlah anak jalanan meningkat hingga 45,8% yakni dari 214 jiwa menjadi 312 jiwa. Sementara pada tahun 2013 jumlah anak jalanan meningkat hingga 59,3% yakni dari 312 jiwa menjadi 497 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka permasalahan anak jalanan mengalami peningkatan.

Berdasarkan uraian sebelumnya menunjukkan bahwa kemitraan antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi

outcome dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini terbukti dari adanya jumlah anak jalanan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Ketidakberhasilan ini disebabkan oleh berbagai hal baik dari segi proses maupun outputnya. Hal tersebut terjadi karena masih adanya masyarakat yang merasa bukan tanggungjawabnya, masih banyaknya masyarakat yang tetap memberikan uang kepada anak jalanan walaupun sudah mengetahui himbauan dari pemerintah, adanya anak jalanan yang meskipun sudah mendapatkan pembinaan tetapi tetap kembali ke jalanan dan masih adanya keluarga anak jalanan yang membiarkan anaknya kembali ke jalanan untuk mengamen ataupun menjual koran.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi *input*, proses dan *output* sudah berhasil. Namun kemitraan dari segi *outcome* dapat dikatakan belum berhasil. Kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi input dapat dikatakan telah berhasil terbukti dengan adanya terbentuk tim wadah yaitu I-PSM yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2012, adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan, dan adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati dalam bentuk SK.

Kemudian kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi proses dapat dikatakan telah berhasil terbukti dengan adanya frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sesuai kebutuhan yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan. Sementara kemitraan yang terjalin antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi *output* dapat dikatakan telah berhasil terbukti jumlah kegiatan yang dilakukan oleh kedua pihak yang mencakup tiga sasaran yakni anak jalanan, keluarga anak jalanan dan masyarakat. Kegiatan anak jalanan melalui pendekatan, perkenalan dan penjajagan dialogis serta *shock therapy* (“garukan”). Bagi anak yang terkena “garukan” dilakukan pembinaan selama 3 hari dengan diberi pengarahan, pembekalan, keterampilan dan pengetahuan. Kegiatan pembinaan pada keluarga anak jalanan melalui program penanggulangan kemiskinan seperti KUBE (Kelompok Usaha Bersama Ekonomi) dan USEP (Usaha Sosial Ekonomi Produktif) serta pengarahan. Sementara bagi masyarakat, program berupa papan himbauan dan larangan untuk memberi uang pada anak jalanan.

Selanjutnya kemitraan antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi *outcome* dapat dikatakan belum berhasil terbukti dari adanya jumlah anak jalanan mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir, masih adanya masyarakat yang merasa bukan tanggungjawabnya, masih banyaknya masyarakat yang tetap memberikan uang kepada anak jalanan walaupun sudah mengetahui himbauan dari pemerintah, adanya anak jalanan yang meskipun sudah mendapatkan pembinaan tetapi tetap kembali ke jalanan dan masih

adanya keluarga anak jalanan yang membiarkan anaknya kembali ke jalanan untuk mengamen ataupun menjual koran.

Kemitraan sangat penting dalam penanganan permasalahan anak jalanan. Dengan adanya kemitraan diharapkan penanganan masalah anak jalanan menjadi lebih optimal. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ambar Teguh Sulistiyani (2004:129) bahwa kemitraan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemitraan yang terjalin antara Disnakertrans Kota Yogyakarta dengan I-PSM merupakan model kemitraan *mutualism partnership*. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:130), kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal. Demikian pula dengan Disnakertrans Kota Yogyakarta dan I-PSM.

Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta dalam penanganan masalah anak jalanan memegang peran sebagai fasilitator, pelayan masyarakat, pendamping, mitra dan penyandang dana dalam penanganan masalah anak jalanan. Sementara I-PSM memegang peranan sebagai implementator, komunikator, motivator, dan dinamisator. Masing-masing peran telah dijalankan dengan

baik oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sihombing (dalam Utami Rahajeng, 2013:12) bahwa beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintahan dalam menangani permasalahan anak jalanan antara lain sebagai fasilitator, pelayan masyarakat, pendamping, mitra dan penyandang dana. Sementara peran organisasi sosial dikemukakan oleh Ismid Hadad (dalam Diah Anisa, 2012:18) diantaranya sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator.

Namun demikian, kemitraan antara Dinsosnakertrans kota Yogyakarta dengan I-PSM dari segi *outcome* dapat dikatakan belum berhasil. Menurut Ditjen P2L & PM (dalam Kuswidanti, 2008: 22), tolok ukur keberhasilan *outcome* adalah menurunnya angka permasalahan yang terjadi. Namun jumlah anak jalanan di Kota Yogyakarta justru mengalami peningkatan. Ketidakberhasilan tersebut terjadi karena faktor proses maupun outputnya. Hal ini terjadi karena kepedulian masyarakat juga masih belum terbentuk, dan sikap masyarakat belum mengalami perubahan dengan tetap memberikan uang pada anak jalanan walaupun sudah dilarang serta pihak keluarga juga tetap membiarkan anaknya untuk kembali ke jalanan.

Oleh karena itu, Dinsosnakertrans dan I-PSM harus lebih meningkatkan kinerjanya dengan sungguh-sungguh dalam penanganan masalah anak jalanan dengan melibatkan berbagai pihak agar dapat mengurangi jumlah anak jalanan. Tidak hanya pemerintah dan I-PSM saja, tetapi juga pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Dinsosnakertrans dan I-PSM juga jangan hanya sekedar mengadakan rapat saja tetapi juga dari hasil rapat yang telah

dilakukan harus benar-benar dilaksanakan agar yang diharapkan dapat tercapai dengan baik. Dengan adanya kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, maka penanganan masalah anak jalanan akan menjadi semakin optimal.